

Fenomena Pengalaman Siswa dalam Proses Komunikasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Menengah Atas di Kota Bandung

Raditya Putra Ely¹, Astri Wulandari²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, aditpe@student.telkomuniversity.ac.id

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, Universitas Telkom, Indonesia, astriw@telkomuniversity.ac.id

Abstract

This study aims to describe the experiences of senior high school students in Bandung in understanding anti-corruption education through communication processes within the school environment. The research employed a qualitative method with a phenomenological approach to explore the students' subjective meanings. Data were collected through in-depth interviews and observations with ten informants, and analyzed using Social Cognitive Theory and Participatory Communication Theory. The findings reveal that students' understanding of anti-corruption values is shaped not only through formal instruction but also through social interactions, organizational experiences, role models within the school, and active participation in dialogical spaces. Open communication, socially responsible practices, and environmental observation contribute to a gradual internalization process from recognizing and understanding, to applying values of integrity in everyday life. This research highlights the importance of participatory learning environments and supportive social contexts in strengthening anti-corruption awareness among adolescents. The study contributes a new perspective to the development of communication models for anti-corruption education that are rooted in student experience and voice.

Keywords: Anti-corruption Education; Participatory Communication; Phenomenology; Student Perception; Youth

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung dalam memaknai pendidikan antikorupsi melalui proses komunikasi di lingkungan sekolah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali makna subjektif dari pengalaman siswa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap sepuluh informan, serta dianalisis menggunakan Teori Kognitif Sosial dan *participatory communication*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan siswa terhadap nilai antikorupsi tidak hanya terbentuk melalui materi ajar formal, tetapi juga melalui interaksi sosial, pengalaman organisasi, keteladanan tokoh sekolah, serta partisipasi aktif dalam ruang dialogis. Komunikasi yang terbuka, pengalaman yang melibatkan tanggung jawab sosial, dan pengamatan terhadap lingkungan terbukti membentuk pemahaman siswa secara bertahap—dari mengetahui, memahami, hingga menerapkan nilai integritas dalam keseharian. Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang belajar partisipatif dan konteks sosial yang mendukung memiliki peran penting dalam memperkuat kesadaran antikorupsi pada remaja. Temuan ini menjadi kontribusi baru dalam pengembangan model komunikasi pendidikan antikorupsi yang berbasis pengalaman dan suara siswa.

Kata Kunci: Fenomenologi; *Participatory Communication*; Pendidikan Antikorupsi; Persepsi Siswa; Remaja

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang mengakar di berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan (Shintawulan dkk., 2024). Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam skala besar seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, tetapi juga dalam bentuk sederhana yang dilakukan oleh pelajar, seperti menyontek atau memalsukan data administrasi (Rozah & Nashriana, 2023). Pendidikan anti korupsi pun telah diupayakan masuk ke kurikulum nasional sebagai strategi jangka panjang membentuk karakter generasi muda

yang berintegritas. Sayangnya, pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif dan belum menyentuh pengalaman nyata siswa (Yanto dkk., 2024). Akibatnya, nilai-nilai integritas yang ditanamkan belum tentu diinternalisasi secara mendalam oleh pelajar. Perlu dipahami bahwa remaja sebagai agen perubahan berada dalam fase pembentukan identitas dan nilai moral (Syifa, 2021; Santrock, 2003).

Kenyataannya, meskipun program pendidikan antikorupsi telah berjalan di sekolah, perilaku koruptif tetap marak ditemui dalam bentuk kecurangan akademik dan manipulasi administratif (Sari & Nugroho, 2019). Banyak siswa masih mempraktikkan tindakan tidak jujur seperti menyontek, menitip absen, hingga memalsukan surat izin, bahkan dengan dukungan dari lingkungan sekitar (Wibowo & Hartati, 2021). Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan nilai justru belum sepenuhnya berhasil menanamkan sikap antikorupsi yang kokoh. Hal ini diperparah oleh minimnya ruang partisipasi siswa dalam proses pembelajaran nilai tersebut (Bustan & Mailani, 2021). Padahal, partisipasi aktif dan komunikasi dua arah sangat penting dalam membentuk kesadaran sosial dan moral siswa. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana proses komunikasi dalam pendidikan antikorupsi benar-benar dijalankan di lingkungan sekolah.

Idealnya, pendidikan antikorupsi dilakukan melalui pendekatan yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman siswa secara langsung (Roling & Pretty, 1997; Bandura, 1986). Pelajar seharusnya tidak hanya menjadi objek yang menerima materi, tetapi dilibatkan secara aktif melalui dialog, observasi, serta pengalaman sosial yang membentuk kesadaran mereka terhadap nilai kejujuran dan integritas. Namun, terdapat kesenjangan antara ideal tersebut dengan kenyataan di lapangan, di mana pendekatan pendidikan masih cenderung satu arah dan kaku (Yanto dkk., 2024). Gap ini menunjukkan bahwa pemahaman pelajar terhadap antikorupsi belum terbentuk secara utuh dari proses komunikasi yang dijalani. Maka dari itu, penting untuk menelusuri lebih jauh bagaimana pelajar memaknai proses komunikasi dalam pendidikan antikorupsi dari sudut pandang mereka sendiri. Penelitian ini menjadi penting karena mampu mengungkap pengalaman subjektif pelajar SMA di Kota Bandung sebagai representasi generasi muda yang akan membentuk masa depan bangsa.

II. TINJAUAN LITERATUR

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan antara pengirim dan penerima yang bertujuan membentuk pemahaman bersama. Dalam konteks pendidikan, komunikasi menjadi sarana utama dalam mentransfer nilai, termasuk nilai-nilai antikorupsi. Proses ini melibatkan tidak hanya penyampaian informasi, tetapi juga pertukaran makna antar individu (Effendy, 2003).

Komunikasi yang efektif menekankan adanya partisipasi dari kedua belah pihak sehingga tercipta interaksi yang bermakna. Hal ini sejalan dengan pendekatan partisipatoris, di mana siswa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi dalam pendidikan perlu dirancang sebagai proses dua arah yang terbuka dan inklusif (Cangara, 2017).

b. Teori Kognitif Sosial

Teori Kognitif Sosial oleh Albert Bandura menekankan bahwa manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Dalam konteks pendidikan, siswa menginternalisasi nilai dengan meniru figur panutan seperti guru atau teman sebaya. Proses ini disebut *observational learning*, di mana individu meniru perilaku yang dianggap positif (Bandura, 1986).

Selain itu, konsep *self-efficacy* dalam teori ini menjelaskan keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam menghadapi tantangan. Siswa yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung lebih percaya diri untuk menolak perilaku koruptif. Interaksi antara perilaku, kognisi, dan lingkungan juga disebut sebagai *reciprocal determinism* yang membentuk cara siswa memahami nilai (Bandura, 2002).

c. *Participatory Communication*

Participatory communication menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu dalam proses komunikasi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam pendidikan, pendekatan ini memandang siswa sebagai subjek aktif yang ikut menentukan arah pembelajaran. Komunikasi partisipatif menciptakan ruang dialog, refleksi kritis, dan pemberdayaan (Servaes, 2008).

Melalui diskusi terbuka dan kolaborasi, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga membentuk makna dari pengalaman mereka. Pendekatan ini relevan dalam pendidikan antikorupsi karena mendorong kesadaran nilai secara kontekstual. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran membuat mereka lebih memahami dan menginternalisasi nilai kejujuran (Pretty & Roling, 1997).

d. *Korupsi*

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan publik. Dalam konteks pendidikan, praktik korupsi dapat ditemukan dalam bentuk kecil seperti mencontek, manipulasi nilai, atau penggunaan dana kelas yang tidak transparan (Transparency International, 2023). Pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah pembiasaan perilaku koruptif sejak dini.

Korupsi tidak hanya berdampak pada ekonomi dan hukum, tetapi juga melemahkan moral dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan melalui pendidikan harus dimulai dari lingkungan sekolah. Menumbuhkan integritas dan kejujuran sejak dini menjadi strategi utama dalam menciptakan budaya antikorupsi (Pahlevi, 2022).

e. *Pendidikan Antikorupsi*

Pendidikan antikorupsi adalah proses penanaman nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada peserta didik sejak usia sekolah. Tujuannya adalah membangun kesadaran serta ketahanan moral terhadap praktik korupsi. Strategi ini penting untuk mencegah pembiasaan perilaku tidak jujur dalam kehidupan sehari-hari (Wibawa et al., 2021).

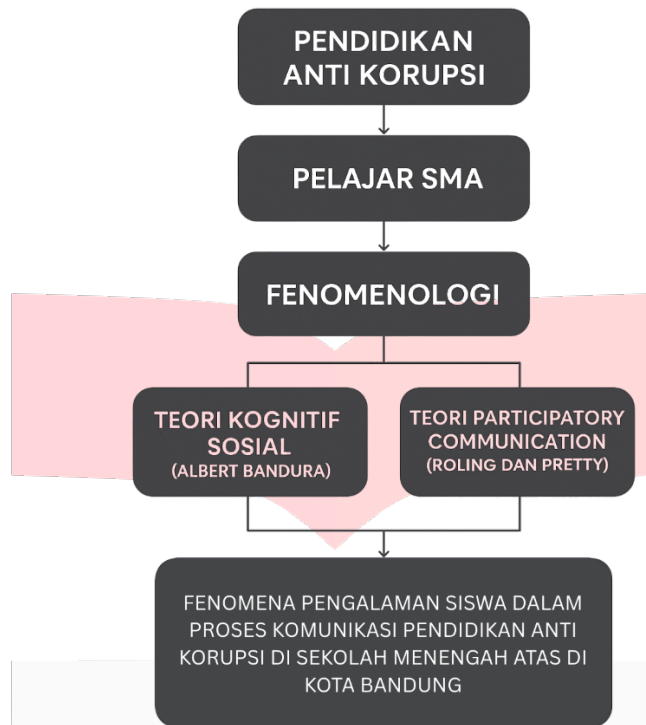
Pendidikan antikorupsi efektif ketika dilakukan melalui metode partisipatif, kontekstual, dan aplikatif. Pengalaman langsung, keteladanan, dan ruang diskusi menjadi kunci keberhasilan dalam menanamkan nilai tersebut. Selain itu, keterlibatan guru, orang tua, dan lingkungan sosial turut menentukan keberhasilan internalisasi nilai (Suat et al., 2024).

f. *Remaja*

Remaja merupakan fase perkembangan yang ditandai oleh pencarian identitas diri, eksplorasi nilai, dan pembentukan karakter. Pada masa ini, individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan tokoh panutan di sekolah (Santrock, 2012). Oleh karena itu, pendidikan karakter pada remaja sangat penting untuk membentuk sikap etis dan tanggung jawab sosial.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, remaja perlu diberikan ruang untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengambil peran aktif dalam kegiatan sekolah. Proses ini dapat meningkatkan kesadaran moral mereka terhadap isu kejujuran dan integritas. Remaja yang merasa memiliki kontrol terhadap tindakan mereka cenderung lebih bertanggung jawab dalam kehidupan sosial (Pertiwi, 2019).

g. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertumpu pada upaya memahami fenomena pengalaman siswa dalam proses komunikasi pendidikan antikorupsi melalui dua perspektif tersebut. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana siswa SMA di Kota Bandung memaknai pengalaman mereka dalam proses belajar nilai-nilai antikorupsi, baik secara kognitif maupun afektif, dalam konteks lingkungan sekolah yang partisipatif dan interaktif.

III.METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap fenomena korupsi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami makna pengalaman individu terhadap suatu fenomena. Dengan metode ini, peneliti dapat menggali bagaimana seseorang mengalami, memahami, dan memberikan makna terhadap suatu peristiwa atau konsep dalam kehidupan mereka. Pada penelitian ini, fenomenologi merupakan pendekatan yang sesuai untuk mengetahui pemaknaan remaja terhadap korupsi. Metode ini dapat membantu peneliti untuk menggali makna korupsi bagi para remaja dari pengalaman mereka.

Subjek penelitian ini adalah remaja yang tinggal di Kota Bandung, dan sedang menempuh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan rentang usia 15-18 tahun. Fokus penelitian ini adalah memahami bagaimana remaja memaknai korupsi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pemilihan subjek ini didasarkan pada asumsi bahwa usia remaja merupakan tahap penting dalam pembentukan nilai dan pemahaman moral, termasuk dalam memahami konsep korupsi. Objek penelitian ini adalah Pendidikan Anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu masalah sosial yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, pemahaman tentang Pendidikan Anti korupsi sejak usia remaja dianggap penting, mengingat remaja merupakan generasi penerus yang akan menentukan masa depan bangsa.

Dengan memahami bagaimana remaja memaknai korupsi, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang lebih efektif.

Informan dalam penelitian ini adalah siswa SMA di Kota Bandung yang berusia antara 15 hingga 18 tahun. Peneliti akan mengambil 10 informan yang terdiri dari 5 laki-laki dan 5 perempuan yang merupakan pelajar SMA di Kota Bandung. Informan dipilih berdasarkan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan faktor usia dan latar belakang pendidikan mereka. Pemilihan informan ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih jelas mengenai pemahaman dan sikap remaja terhadap korupsi. Berikut adalah data informan:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Diene	15 Tahun	Informan Kunci
2.	Thara	15 Tahun	
3.	Azka	15 Tahun	
4.	Naufazel	15 Tahun	
5.	Rizky	15 Tahun	
6.	Bima	15 Tahun	
7.	Ridho	16 Tahun	
8.	Berniez	15 Tahun	
9.	Amyra	15 Tahun	
10.	Ashara	15 Tahun	

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Untuk memahami secara sistematis bagaimana proses komunikasi pendidikan antikorupsi dimaknai oleh pelajar SMA di Kota Bandung, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritik utama. Teori Kognitif Sosial dan Teori *Participatory Communication* dipilih karena mampu menjelaskan proses pembelajaran nilai melalui interaksi sosial dan partisipasi aktif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini dijabarkan berdasarkan dimensi dari masing-masing teori seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Unit Analisis

Teori	Dimensi	Unit Analisis
Teori Kognitif Sosial (Bandura, 1986)	<i>Observational learning</i>	Pengamatan terhadap perilaku antikorupsi guru, teman, atau panutan.
	<i>Self-Efficacy</i>	Keyakinan diri untuk bersikap jujur dalam situasi menantang.
	<i>Reciprocal Determinism</i>	Pengaruh timbal balik antara sikap, pikiran, dan lingkungan sosial.
<i>Participatory Communication Theory</i> (Roling & Pretty, 1997)	<i>Active Participation</i>	Keterlibatan dalam kegiatan atau diskusi antikorupsi di sekolah.
	<i>Dialogical Learning</i>	Proses belajar nilai antikorupsi melalui dialog dua arah.
	<i>Empowerment</i>	Rasa mampu dan berdaya mendorong kejujuran di lingkungan sekolah.
	<i>Learning Platforms</i>	Media atau forum tempat memperoleh pemahaman nilai antikorupsi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Pengelompokan Tema Umum Berdasarkan Teori Kognitif Sosial dalam Proses Komunikasi Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah

No.	Tema	Temuan
Proses Pembentukan Nilai Anti-Korupsi		
1.	Tokoh yang Mengajarkan Anti-Korupsi	a. Guru menjadi panutan dalam menunjukkan nilai kejujuran dan transparansi. b. Kakak kelas atau pengurus OSIS menjadi contoh dalam bersikap jujur dan terbuka. c. Teman sebaya memengaruhi siswa untuk meniru perilaku antikorupsi secara tidak langsung. d. Perilaku antikorupsi muncul dari hasil observasi terhadap diskusi atau kegiatan organisasi sekolah.
2.	Keyakinan Diri dalam Berperilaku Jujur	a. Siswa memiliki inisiatif pribadi untuk bersikap jujur meskipun tanpa arahan langsung. b. Siswa merasa mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab seperti laporan kas. c. Nilai-nilai antikorupsi ditanamkan sejak kecil dan diperkuat di lingkungan sekolah. d. Siswa percaya bahwa kejujuran harus dilakukan meskipun tidak diawasi.
3.	Respons Timbal Balik terhadap Lingkungan	a. Lingkungan sosial yang mendukung kejujuran memperkuat perilaku antikorupsi siswa. b. Siswa ikut menyuarakan antikorupsi ketika teman atau gurunya memberi ruang dialog. c. Nilai jujur berkembang ketika siswa merasa tindakan mereka dihargai atau mendapat respons positif. d. Siswa lebih berani bersikap antikorupsi jika suasana sekolah terbuka dan demokratis.
Hambatan dalam Internalisasi Nilai		
1.	Tokoh yang Mengajarkan Anti-Korupsi	a. Kurangnya ruang diskusi terbuka mengenai isu-isu antikorupsi di lingkungan sekolah. b. Tidak adanya pembahasan rutin mengenai nilai kejujuran di kelas membuat siswa kesulitan meniru perilaku baik.
2.	Keyakinan Diri dalam Berperilaku Jujur	a. Kurangnya dukungan verbal atau pujian terhadap perilaku jujur membuat siswa merasa usahanya tidak berarti. b. Tanggung jawab seperti pengelolaan dana atau tugas kelompok sering diberikan tanpa pendampingan, sehingga siswa tidak yakin bisa melakukannya dengan benar.
3.	Respons Timbal Balik terhadap Lingkungan	a. Lingkungan sekolah cenderung pasif terhadap isu kejujuran, membuat siswa enggan bertindak aktif. b. Ketika siswa mencoba bersikap jujur, respons yang didapat justru tidak mendukung.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Tabel 4.2 Pengelompokan Tema Umum Berdasarkan Teori *Participatory Communication* dalam Proses Komunikasi Pendidikan Anti-Korupsi di Sekolah

No.	Tema	Temuan
Proses Pembentukan Nilai Anti-Korupsi		
1.	Keterlibatan Aktif	a. Siswa terlibat langsung dalam kegiatan organisasi yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab. b. Siswa aktif menyampaikan pendapat dalam forum kelas atau rapat angkatan. c. Peran aktif siswa dalam pembagian tugas, pengelolaan dana, dan penyusunan aturan yang adil.
2.	Diskusi Dua Arah	a. Guru membuka ruang diskusi terbuka tentang isu-isu korupsi atau nilai etika. b. Siswa dan teman sebaya berdialog untuk menyelesaikan persoalan tanggung jawab bersama. c. Proses diskusi informal (seperti obrolan dalam rapat atau organisasi) membentuk pemahaman kolektif.
3.	Pemberdayaan	a. Siswa diberi kepercayaan untuk memegang tanggung jawab seperti bendahara, ketua kelompok, atau panitia kegiatan. b. Siswa menunjukkan inisiatif jujur tanpa tekanan dari guru. c. Nilai kepercayaan diri siswa tumbuh karena mereka dilibatkan langsung dan dianggap mampu.
4.	Ruang Belajar	a. Kelas dan organisasi menjadi ruang belajar sosial di mana siswa merefleksikan nilai kejujuran. b. Proyek kreatif seperti pembuatan poster antikorupsi digunakan sebagai media pembelajaran nilai. c. Interaksi antar siswa dalam kegiatan informal juga memperkuat pemahaman nilai etika.
Hambatan dalam Internalisasi Nilai		
1.	Keterlibatan Aktif	a. Siswa hadir secara fisik namun tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. b. Kegiatan antikorupsi lebih bersifat formal dan tidak memberi ruang inisiatif siswa. c. Struktur organisasi yang hierarkis membuat siswa biasa merasa pendapatnya tidak dihargai.
2.	Diskusi Dua Arah	a. Guru mendominasi diskusi sehingga siswa enggan menyampaikan pandangan. b. Kurangnya pembiasaan untuk membahas isu-isu etika secara terbuka di kelas. c. Siswa merasa takut salah atau malu dalam diskusi antikorupsi.
3.	Pemberdayaan	a. Siswa tidak diberi kepercayaan penuh dalam tugas yang menuntut kejujuran. b. Tidak ada umpan balik positif ketika siswa mencoba bersikap jujur. c. Peran siswa dibatasi hanya sebagai pelaksana tanpa ruang untuk mengambil keputusan.
4.	Ruang Belajar	a. Minimnya forum kreatif atau ruang reflektif di sekolah.

-
- b. Kegiatan kampanye nilai hanya bersifat satu arah atau proyek formal tanpa tindak lanjut.
 - c. Kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan yang membentuk budaya integritas.
-

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

b. Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti akan membahas dan mengaitkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada BAB II, khususnya Teori Kognitif Sosial dan Teori *Participatory Communication*. Pembahasan ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses komunikasi pendidikan anti-korupsi berlangsung di sekolah, tetapi juga berfokus pada bagaimana siswa sebagai remaja membentuk makna terhadap nilai-nilai antikorupsi yang mereka alami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelajar SMA di Kota Bandung memaknai pendidikan anti-korupsi yang mereka terima. Oleh karena itu, peneliti juga mendalami pengalaman subjektif para informan, termasuk bagaimana mereka memahami nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab, bagaimana mereka merespons lingkungan sosial di sekolah serta faktor-faktor apa saja yang memperkuat atau menghambat pemaknaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam prosesnya, dimensi dari kedua teori digunakan untuk mengelompokkan pengalaman siswa menjadi unit analisis yang lebih sistematis, seperti *observational learning*, keyakinan diri, respons timbal balik, keterlibatan aktif, dialog dua arah, pemberdayaan, dan ruang belajar. Setiap dimensi tersebut dipadukan dengan narasi dari para informan yang mencerminkan nilai-nilai antikorupsi yang dibentuk melalui praktik sosial dan komunikasi partisipatif. Dengan demikian, pembahasan ini menjadi landasan untuk memahami bahwa pendidikan antikorupsi yang efektif bagi remaja tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga harus mengaktifkan peran serta siswa dalam konteks sosial sekolah yang suportif dan partisipatif.

1. Proses Komunikasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah

Proses komunikasi pendidikan antikorupsi di sekolah berlangsung melalui interaksi formal maupun informal antara siswa, guru, dan lingkungan sosial seperti OSIS, diskusi kelompok, serta percakapan sehari-hari (Amri & Nur Fauzi, 2024). Nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab disampaikan melalui komunikasi yang bersifat partisipatif dan aplikatif, yang mendorong siswa untuk mengalami dan memaknai nilai secara langsung (Wibawa et al., 2021). Tokoh panutan seperti guru dan pengurus OSIS juga berperan penting dalam proses internalisasi nilai melalui keteladanan dan interaksi sosial (Pertiwi, 2019; Pahlevi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak hanya ditentukan oleh materi ajar, tetapi oleh keterlibatan aktif siswa dalam lingkungan sosial yang mendukung.

Selain pembelajaran formal, keterlibatan siswa dalam praktik seperti transparansi laporan keuangan, diskusi kelas, dan pengambilan keputusan bersama membentuk pemahaman dan kesadaran etis mereka (Suat et al., 2024; Wulandari et al., 2021). Faktor seperti gender, pengalaman sosial, serta pemberdayaan melalui ruang partisipasi juga memengaruhi cara siswa memahami dan menjalankan nilai antikorupsi (Wulandari et al., 2024). Pemahaman siswa berkembang bertahap, mulai dari mengenal bentuk korupsi hingga mampu menerapkan integritas dalam keseharian secara konsisten. Oleh karena itu, proses komunikasi yang terbuka dan dialogis menjadi kunci utama dalam menciptakan kesadaran dan budaya antikorupsi di lingkungan sekolah.

2. Pemaknaan Pendidikan Antikorupsi bagi Siswa

Pemaknaan siswa terhadap pendidikan antikorupsi terbentuk melalui keterlibatan aktif dalam pembelajaran, organisasi, dan interaksi sosial yang membentuk pemahaman akan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta integritas. Proses ini bersifat transformatif dan berlangsung melalui jalur formal, informal, maupun nonformal yang menekankan pembelajaran partisipatif (Amri & Nur Fauzi, 2024). Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa memahami pendidikan antikorupsi sebagai ajakan untuk hidup jujur, yang diwujudkan melalui praktik nyata seperti laporan keuangan yang transparan atau sikap

jujur dalam diskusi kelompok. Hal ini menandakan bahwa siswa tidak hanya mengetahui nilai tersebut secara kognitif, tetapi telah memaknainya secara afektif dan aplikatif.

Temuan ini sejalan dengan Suat et al. (2024), yang menegaskan pentingnya keterlibatan langsung siswa dalam membentuk pemahaman terhadap nilai antikorupsi melalui praktik nyata dan pengalaman personal. Keteladanan guru, dukungan teman, dan kepuasan menjalankan tanggung jawab menjadi faktor yang memperkuat makna nilai kejujuran dalam kehidupan mereka. Seperti dijelaskan Pertiwi (2019), nilai akan lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengalaman dan bukan sekadar narasi normatif. Dengan demikian, pemaknaan siswa dibentuk oleh pengalaman nyata, interaksi sosial, dan ruang partisipasi yang mendorong internalisasi nilai antikorupsi secara reflektif.

3. Peran Tokoh Panutan dalam Proses Internalisasi Nilai Antikorupsi

Dalam pendidikan antikorupsi, tokoh panutan seperti guru, kakak kelas, dan teman sebaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku siswa melalui keteladanan. Siswa belajar menginternalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab lewat pengamatan terhadap perilaku positif orang-orang di sekitar mereka (Bandura, 1986). Hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak siswa mulai memahami pentingnya nilai antikorupsi setelah melihat langsung tindakan nyata dari figur panutan. Proses ini mencerminkan pembelajaran sosial yang efektif dan berkontribusi pada tahap awal pemahaman dan penerapan nilai integritas.

Penelitian Wibawa et al. (2021) menegaskan bahwa internalisasi nilai moral sangat dipengaruhi oleh keteladanan dari tokoh pendidikan di sekolah. Ketika perilaku antikorupsi ditunjukkan secara konsisten oleh figur panutan, siswa terdorong untuk meniru dan membentuk makna pribadi terhadap pentingnya integritas. Dalam konteks ini, tokoh panutan menjadi fondasi dalam komunikasi nilai antikorupsi karena membantu siswa bergerak dari sekadar mengetahui menuju penerapan nyata. Oleh karena itu, keteladanan menjadi aspek sentral dalam strategi pendidikan antikorupsi yang efektif.

4. Keyakinan Diri dalam Menerapkan Perilaku Jujur di Sekolah

Self-efficacy dalam konteks pendidikan antikorupsi mencerminkan keyakinan siswa terhadap kemampuannya bertindak jujur dan menolak perilaku korup. Keyakinan ini terbentuk melalui lingkungan yang mendukung seperti teladan sosial, dialog, dan pembiasaan, sesuai pendekatan jalur informal dan nonformal (Bandura, 1986). Dalam penelitian ini, sebagian besar siswa menunjukkan tingkat *self-efficacy* tinggi yang tercermin dari tindakan konkret seperti transparansi keuangan kelas dan kerja kelompok yang adil. Hal ini menandakan bahwa nilai kejujuran telah diinternalisasi dan diterapkan secara nyata.

Penemuan ini sejalan dengan Suat et al. (2024), yang menyatakan bahwa karakter dan efikasi diri memperkuat konsistensi perilaku integritas siswa. *Self-efficacy* bukan hanya faktor psikologis, tetapi juga hasil dari proses pembelajaran etis yang terus-menerus. Siswa yang percaya diri dalam kejujurannya lebih siap menghadapi tantangan moral baik dalam situasi formal maupun informal. Maka, *self-efficacy* menjadi indikator penting keberhasilan komunikasi pendidikan antikorupsi yang menyentuh ranah personal siswa.

5. Respons Siswa terhadap dalam Mewujudkan Nilai Integritas

Dalam teori kognitif sosial, Bandura (1986) menjelaskan bahwa *reciprocal determinism* menggambarkan hubungan saling memengaruhi antara individu, perilaku, dan lingkungan sosial. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, siswa tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tetapi juga aktif membentuk lingkungan yang mendukung nilai integritas melalui tindakan seperti transparansi dalam laporan keuangan kelas. Sikap ini mencerminkan pendekatan pendidikan karakter berbasis pengalaman dan pembiasaan, yang mendorong siswa menjadi aktor moral. Temuan ini juga sejalan dengan Pahlevi (2022) yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik dalam membangun sistem nilai yang kuat di sekolah.

Berdasarkan wawancara, siswa menunjukkan kesadaran evaluatif dengan mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan jujur yang mereka lakukan, bukan sekadar menjalankan nilai secara pasif. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa nilai kejujuran telah menjadi bagian dari sistem nilai internal,

bukan sekadar instruksi eksternal. Ketika lingkungan sekolah memberi ruang untuk bertindak jujur dan siswa merespons secara bertanggung jawab, maka tercipta ekosistem yang mendukung nilai-nilai antikorupsi. Di sinilah keberhasilan pendidikan antikorupsi terlihat, yaitu saat siswa mengambil peran sebagai penjaga nilai di lingkungannya.

6. Partisipasi Aktif Siswa dalam Komunikasi Pendidikan Antikorupsi

Partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam pendekatan komunikasi partisipatoris, di mana siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga agen yang membentuk makna dan menyebarkan nilai antikorupsi melalui pengalaman nyata. Dalam penelitian ini, siswa menunjukkan partisipasi aktif melalui kegiatan seperti menyusun poster antikorupsi, diskusi antarkelas, dan keterlibatan organisasi, yang mencerminkan tingkat pemahaman pada level menerapkan hingga mencipta. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar memahami konsep, tetapi juga mampu mengekspresikannya secara kreatif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan jalur pendidikan berbasis pengalaman yang menekankan pembelajaran melalui kontribusi aktif (Rusli et al., 2024).

Temuan ini menguatkan bahwa keterlibatan nyata siswa dalam pendidikan antikorupsi mampu memperkuat internalisasi nilai kejujuran dan integritas. Ketika siswa diberi ruang untuk berperan dan membuat keputusan, nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga dihidupi dalam tindakan sehari-hari. Pendidikan menjadi lebih kontekstual saat siswa merasa memiliki dan bertanggung jawab atas nilai-nilai yang mereka ciptakan bersama. Dalam konteks ini, partisipasi aktif bukan hanya strategi pembelajaran, tetapi juga proses pembentukan karakter antikorupsi yang tumbuh dari kesadaran reflektif (Rusli et al., 2024).

7. Diskusi Dua Arah sebagai Sarana Pemahaman Nilai Antikorupsi

Dialog merupakan inti dari komunikasi partisipatoris yang memungkinkan proses pembelajaran dua arah antara guru dan siswa, maupun antar siswa itu sendiri. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, dialog membantu siswa membangun pemahaman melalui pertukaran gagasan, klarifikasi nilai, dan refleksi kritis terhadap pengalaman sosial mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa diskusi dua arah berlangsung tidak hanya di kelas, tetapi juga dalam forum seperti OSIS, yang memperkuat praktik integritas secara kolektif. Hal ini mencerminkan bahwa siswa tidak sekadar menerima nilai kejujuran, tetapi aktif mengonstruksi maknanya melalui proses diskursif.

Penelitian ini mendukung temuan Rusli dkk. (2024), yang menyatakan bahwa *dialogical learning* memperdalam pemahaman sosial siswa melalui interaksi langsung yang kontekstual. Melalui diskusi yang terbuka dan setara, siswa tidak hanya menghafal definisi antikorupsi, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Proses ini mendorong siswa mencapai pemahaman evaluatif hingga kreatif, ketika mereka mampu menyusun pemaknaan nilai berdasarkan pengalaman sendiri. Dengan demikian, dialog menjadi sarana efektif dalam membentuk kesadaran moral kolektif terhadap integritas sebagai nilai yang hidup di lingkungan sosial mereka.

8. Pemberdayaan Siswa Melalui Tanggung Jawab Sosial

Empowerment dalam pendidikan antikorupsi berarti memberi siswa ruang dan kepercayaan untuk mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang jujur dan bertanggung jawab. Pemberdayaan ini tidak hanya berupa tugas, tetapi juga proses membentuk kesadaran, kemandirian moral, dan tanggung jawab sosial melalui pelibatan langsung (Harmey dkk., 2022). Dalam penelitian ini, siswa yang berperan sebagai bendahara kelas menunjukkan sikap tanggung jawab, seperti menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan mengumpulkan tugas tanpa harus diingatkan. Hal ini menandakan bahwa siswa telah mencapai tingkat pemahaman yang mengevaluasi, di mana nilai diterapkan secara mandiri tanpa tekanan eksternal.

Ketika siswa merasa diberi kepercayaan, mereka lebih berani mengekspresikan nilai kejujuran dan menolak perilaku tidak etis di lingkungan sekolah. Pemberdayaan menjadi fondasi penting dalam menumbuhkan kepekaan sosial serta kesadaran etis dalam pendidikan antikorupsi. Dalam pendekatan fenomenologi, pengalaman diberdayakan ini membentuk makna nilai kejujuran sebagai bagian dari

identitas sosial, bukan sekadar aturan. Maka, nilai antikorupsi tidak hanya dijalankan, tetapi diperjuangkan dengan kesadaran dan tanggung jawab pribadi (Harmey dkk., 2022).

9. Ruang Belajar Sebagai Media Penamaan Nilai-nilai Integritas

Dalam teori *Participatory Communication*, ruang belajar dipahami sebagai ekosistem sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran nilai, pengalaman, dan pengetahuan, bukan sekadar tempat fisik (Harmey, 2024). Dalam konteks pendidikan antikorupsi, ruang ini memberi siswa kesempatan untuk mengalami nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab melalui praktik nyata. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aktivitas seperti membuat poster antikorupsi mendorong siswa melakukan riset mandiri, refleksi sosial, dan pengambilan sikap etis. Ini menunjukkan bahwa ruang belajar telah menjadi media internalisasi nilai melalui proses reflektif yang mendorong pemahaman pada tingkat evaluatif.

Temuan ini menguatkan bahwa ruang belajar yang dialogis dan kolaboratif mampu membentuk karakter siswa secara lebih mendalam (Harmey, 2024). Ketika siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga diberi ruang untuk menilai dan menerapkannya, nilai antikorupsi menjadi lebih kontekstual dan membumi. Proses ini menjembatani antara pemahaman konseptual dan tindakan nyata, memperkuat integritas melalui pengalaman langsung. Maka, ruang belajar yang ideal adalah ruang yang membuka kesempatan refleksi, diskusi, dan praktik nilai dalam lingkungan sosial siswa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi pendidikan antikorupsi di kalangan siswa SMA Bandung terbentuk melalui pengalaman personal dan lingkungan sosial seperti keluarga, guru, teman sebaya, serta tokoh sekolah. Siswa memahami nilai integritas tidak hanya dari materi formal, tetapi juga melalui keteladanan dan pengalaman langsung, sesuai dengan konsep *observational learning*.

Tingginya *self-efficacy* siswa dalam menerapkan nilai kejujuran tercermin dalam tindakan nyata seperti pengelolaan uang kas dan interaksi sosial. Pendekatan partisipatif seperti diskusi dua arah dan keterlibatan organisasi memperkuat pemahaman nilai hingga ke tahap reflektif dan kreatif. Pendidikan antikorupsi perlu dipandang sebagai proses sosial yang berkelanjutan dengan dukungan lingkungan yang konsisten dan ruang belajar yang terbuka.

Berlandaskan hasil temuan yang didapatkan, diperoleh sejumlah hal yang dapat menjadi saran untuk dijadikan pertimbangan ke depannya:

a. Saran Akademis

1. Menggunakan pendekatan kualitatif lain seperti etnografi pendidikan atau studi naratif untuk pemahaman yang lebih mendalam.
2. Mengembangkan kajian komunikasi pendidikan berbasis partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif.
3. Menyusun model komunikasi pendidikan dengan prinsip dialog, suara siswa, pemberdayaan, dan hubungan setara.
4. Melakukan studi perbandingan di wilayah atau jenjang pendidikan lain untuk melihat pengaruh sosial-budaya terhadap pemaknaan antikorupsi.

b. Saran Praktis

1. Menerapkan pendekatan partisipatif melalui diskusi, simulasi kasus, dan kegiatan kolaboratif.
2. Memberdayakan guru dan tokoh organisasi siswa sebagai panutan nilai integritas.
3. Meningkatkan kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk membentuk karakter siswa secara selaras.
4. Mendorong kebijakan kurikulum antikorupsi yang aplikatif dan berbasis nilai oleh pemerintah dan dinas pendidikan.
5. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas pendidikan antikorupsi agar tetap relevan dengan dinamika pelajar.

REFERENSI

- Harmey, S., Ang, L., & Grenier, J. (2022). A participatory approach to embedding evidence in practice to support early language and communication in a London nursery school. *London Review of Education*, 20(1).
- Isroani, F., Mahmud, S., Qurtubi, A., Pebriana, P. H., Rahmatia, A., Yuwansyah, Y., Yetti, R., Kessi, A. M. F., & Aminah. (2023). Psikologi Perkembangan. In *Psikologi Perkembangan* (pp. 155–164).
- Littlejohn, S., & Foss, K. . (2009). Sources: Encyclopedia of Communication Theory. In *Reference & User Services Quarterly* (Vol. 49, Issue 4). <https://doi.org/10.5860/rusq.49.4.3632>
- Pahlevi, F. S. (2022). PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: PERSPEKTIF LEGAL SYSTEM LAWRENCE M. FREIDMAN. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun>
- Pertiwi, K. (2019). Kesenjangan dalam Wacana Antikorupsi di Indonesia: Temuan dari Literatur Studi Korupsi Kritis. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5, 133–150. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.475>
- Rozah, U., & Nashriana, N. (2023). Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 411–432.
- Rusli, P. R., Djaafar, L., & Mozin, N. (2024). STRATEGI MEMBANGUN KESADARAN MORAL ANTI KORUPSI PADA SISWA DI SMAN 4 GORONTALO. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(2).
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2019). Perilaku Koruptif di Kalangan Pelajar: Studi Kasus pada Sekolah Menengah Atas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 24(3), 289–302.
- Servaes, J. (2008). Communication for development and social change. In *Communication for Development and Social Change* (Issue January 2008). <https://doi.org/10.4135/9788132108474>
- Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Ellia, T. (2024). Analisis Dampak Penyalahgunaan Wewenang terhadap Tindak Pidana Korupsi. 3(4).
- Suat, H., Rieuwpassa, S., Rahman Haulussy, R., Suat, R., Borut, M., & Anurogo, D. (2024). Implementation of Corruption Prevention in Health High Schools Makassar. *International Journal of Health Sciences*, 2(1).
<https://doi.org/10.59585/ijhs>
- Wibowo, S., & Hartati, S. (2021). Pemalsuan Data dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Implikasi terhadap Integritas Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 35(1), 15–28.
- Wulandari, A., Fitriawan, R. A., Nugroho, C., Nurdiarti, R. P., Nastain, M., & Nasionalita, K. (2024). Indonesia's Women: Corruption Is a Normal Thing (Survey of Women's Perception of Corruption in Indonesia). *SAGE Open*, 14(2). <https://doi.org/10.1177/21582440241259956>
- Wulandari, A., Nugroho, C., F, R. A., & Nastain, M. (2021). Women and Corruption in Indonesia (Phenomenological Study of the Role and Position of Women in Eradicating Corruption).
- Yudiatmaja, W. E., & Suryanto, T. (2020). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Korupsi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 123–137.